

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai makhluk sosial setiap manusia saling berinteraksi secara pribadi atau dengan badan hukum untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya. Adanya suatu interaksi antar pihak akan menciptakan hubungan-hubungan hukum yang spesifik. Dari hubungan hukum tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus saling dipenuhi. Namun dalam pemenuhan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak seringkali terabaikan sehingga dapat menimbulkan perbedaan interpretasi atau silang pendapat yang berkemungkinan menuju pada sengketa.¹

Berbagai macam faktor dapat menjadi penyebab terjadinya suatu sengketa, diantaranya mengenai perbedaan kepentingan atau perselisihan antar pihak satu dengan pihak lainnya. Sengketa juga dapat disebabkan oleh adanya suatu aturan-aturan yang dianggap kaku sebagai penghalang dan penghambat untuk dapat mencapai suatu tujuan setiap pihak. Karena setiap pihak akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan, sehingga potensi terjadinya suatu sengketa menjadi semakin besar.²

¹ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010, hlm, 617

² Jimmy Joses Sembiring, Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan; Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase, Jakarta: Visimedia, 2011, hlm, 1

Hukum Perdata atau disebut juga dengan *Civil Law* merupakan bagian dari ilmu hukum yang mengatur tentang penyelesaian sengketa yang muncul akibat dari konflik kepentingan swasta antar subjek hukum satu dengan lainnya, baik antara orang satu dengan orang lainnya, atau orang dengan badan hukum, maupun badan hukum dengan badan hukum.

Hukum Acara Perdata adalah hukum formil perdata yang berfungsi untuk memelihara, menegakkan dan mempertahankan ketentuan hukum perdata materiil. Batasan dari Hukum Acara Perdata dapat dideskripsikan secara singkat yaitu “peraturan hukum yang mengatur bagaimanakah proses seseorang untuk berperkara perdata di depan sidang pengadilan serta bagaimana proses hakim (pengadilan) menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara serta bagaimana proses pelaksanaan putusan dalam rangka mempertahankan eksistensi hukum perdata materiil”.³

Sengketa perdata dapat terjadi ketika terdapat salah satu pihak yang merasa dirugikan menuntut haknya melalui perantara lembaga peradilan atau yang lebih dikenal dengan jalur litigasi. Hal ini tidak akan menjadi masalah ketika dalam penyelesaiannya ringkas dengan biaya yang lebih sedikit daripada nilai materiil perkara yang menjadi sengketa. Akan tetapi kenyataannya pada beberapa penyelesaian perkara memerlukan biaya yang cukup banyak, sehingga dapat menjadikan hambatan perkembangan finansial kepada para pihak yang terkait.

³ Muhammad Saleh dan Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Perspektif Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni : Bandung, 2012 hlm 7

Proses penyelesaian perkara terkadang memerlukan biaya yang tidak sedikit dan juga biasanya memerlukan waktu yang cukup lama. Tetapi beberapa orang mementingkan untuk memenangkan perkara daripada mempersoalkan mengenai besarnya nilai yang dikeluarkan selama proses acara peradilan berlangsung, ataupun berapa lama waktu yang berjalan dari awal proses hingga sampai pada putusan. Terdapat pula beberapa pihak yang sebenarnya sudah tidak menginginkan untuk memperpanjang suatu sengketa, tetapi karena “gengsi” atau karena sudah “terlanjur” untuk memilih meneruskan proses litigasi. Tentunya hal ini tidak sejalan dengan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan yang merupakan salah satu asas yang penting dalam proses litigasi.

Pada prinsipnya terdapat dua cara penyelesaian sengketa perdata, yaitu secara damai atau tanpa melalui pengadilan atau biasa disebut nonlitigasi, dan penyelesaian melalui pengadilan atau biasa disebut litigasi. Penyelesaian secara damai (nonlitigasi) adalah suatu penyelesaian sengketa yang dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak dan prosedur penyelesaian atas suatu sengketa yang sepenuhnya diserahkan kepada para pihak yang bersengketa.

Sedangkan penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau secara litigasi berpedoman pada Hukum Acara Perdata positif yaitu *Rechts Reglement van Buitengewesten (RBg)* untuk wilayah luar Jawa dan Madura, dan *het Herziene Indische Reglement (HIR)* untuk wilayah Jawa dan Madura, dan peraturan-peraturan yang mengatur tentang acara perdata

lainnya dan yang mengatur mengenai persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi supaya suatu sengketa dapat diajukan serta upaya-upaya yang dapat dilakukan.⁴

Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman menentukan mengenai suatu sistem penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat dan biaya ringan, yang juga merupakan salah satu asas dalam peradilan di Indonesia.

Proses penyelesaian sengketa perdata secara konvensional dilakukan melalui gugatan ke pengadilan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas sederhana memiliki maksud bahwa hakim dalam pelaksanaannya mengadili para pihak yang sedang berperkara didalam memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk bisa mendapatkan keterangan yang akurat dari pihak satu dengan pihak lainnya dan saksi-saksi menggunakan bahasa yang sederhana, yang mudah dipahami dan dimengerti, dan berusaha semaksimal mungkin supaya perkaranya diupayakan perdamaian.⁵

Sederhana adalah acara yang mudah dipahami, jelas dan tidak berbelit-belit. Semakin sederhana dan sedikit formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara dimuka pengadilan maka semakin baik. Cepat ialah merujuk kepada jalannya suatu peradilan. Dan dalam hal ini bukan hanya jalannya peradilan dalam pemeriksaan dimuka persidangan saja akan tetapi juga proses penyelesaian dari berita acara pemeriksaan

⁴ Jimmy Joses Sembiring, *Cara menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan; Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase*, Jakarta: Visimedia, 2011, hlm. 2.

⁵ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 23.

dipersidangan sampai dengan penandatanganan putusan oleh hakim dan pelaksanaannya. Tidak jarang pula suatu penyelesaian perkara tertunda sampai bertahun-tahun dikarenakan saksi yang tidak datang atau para pihak yang bergantian tidak datang, atau meminta mundur. Bahkan ada pula yang sampai perkaranya dilanjutkan oleh para ahli warisnya. Ditentukannya biaya yang ringan supaya dapat terpikul oleh masyarakat yang berperkara. Biaya perkara yang dianggap tinggi dapat menyebabkan pihak yang berkepentingan enggan untuk mengajukan tuntutan hak ke pengadilan.⁶

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, mengatur selain ketentuan mengenai besarnya nilai materiil dalam gugatan, peraturan ini juga mengatur mengenai kriteria lainnya untuk sebuah perkara dapat diselesaikan melalui Gugatan Sederhana (Small Claim Court). Dikarenakan tidak semua perkara dapat diselesaikan dengan Gugatan Sederhana (Small Claim Court).

Sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 yang menjelaskan apabila dalam proses pemeriksaan hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka hakim akan mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, dan mencoret dari register perkara, dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara

⁶Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Cet. III (Yogyakarta:Liberty, 1988) hlm, 23

kepada penggugat. Dan juga dalam Pasal 11 ayat (4) menjelaskan bahwa terhadap penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diajukan suatu upaya hukum apapun.

Untuk dapat dikatakan sebagai gugatan sederhana maka terdapat ketentuan yang telah diatur dalam Perma Nomor 4 Tahun 2019 diantaranya yaitu mengenai jumlah gugatan, bukan perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur dalam perundang-undangan dan sengketa hak atas tanah, domisili di daerah hukum yang sama, dan pihak yang berperkara apabila lebih dari satu maka harus mereka yang memiliki kepentingan hukum yang sama, dan wajib hadir dalam persidangan secara langsung.

Dalam penelitian lapangan yang dilakukan oleh penulis, penulis menemukan putusan penetapan dismissal yang dikeluarkan oleh hakim yang bertugas mengadili perkara gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, yaitu diantaranya penetapan dismissal yang dikeluarkan oleh Hakim FHN, dan Hakim MNW, bahwa yang menjadi alasan dikeluarkannya penetapan dismissal tersebut ialah mengenai kepentingan yang sama sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 4 Tahun 2019, dan mengenai tidak dilampirkannya bukti surat yang sudah dilegalisir bagi Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (4) Perma Nomor 4 Tahun 2019.

Dalam penelitian ini, penulis menemukan permasalahan dalam gugatan sederhana mengenai pengeluaran penetapan putusan Dismissal di

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, yang mana terdapat perbedaan penafsiran dalam memberikan pengertian terhadap “kepentingan yang sama” sebagaimana isi dalam pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 4 Tahun 2019.

A. Rumusan Masalah

Suatu penelitian diperlukan adanya pembatasan masalah supaya penelitian tersebut terfokus kepada permasalahan pada penulisan penelitian kali ini sesuai dengan judul penelitian yaitu “Tinjauan Yuridis Empiris Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Dismissal Terhadap Gugatan Sederhana (Studi Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri)”. Maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan putusan dismissal terhadap gugatan sederhana berdasarkan Perma Nomor 4 Tahun 2019 di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana hambatan hakim dalam memberikan putusan dismissal terhadap gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri?

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penulisan penelitian kali ini terbatas pada judul penulisan yaitu “Tinjauan Yuridis Empiris Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Dismissal Terhadap Gugatan Sederhana (Studi Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan putusan dismissal terhadap Gugatan Sederhana berdasarkan Perma Nomor 4 Tahun 2019 di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana hambatan hakim dalam memberikan putusan dismissal terhadap Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik untuk pribadi penulis sendiri, untuk ilmu akademis, dan juga memberikan manfaat bagi masyarakat umum. Dengan objek penelitian mengenai Tinjauan Yuridis Empiris Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Dismissal Terhadap Gugatan Sederhana (Studi Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri) kami harapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Penulis berharap penelitian ini dapat mengembangkan pengetahuan yang didapat didalam perkuliahan serta dapat mempraktekannya sehingga bermanfaat dibidang hukum dan juga dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap khasanah ilmu pengetahuan pada umumnya yang berkaitan dengan hukum perdata khususnya pada penyelesaian gugatan sederhana.
2. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan wawasan bagi penulis dalam kaitannya dengan permasalahan yang diteliti pada penulisan penelitian ini. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat membantu dan memberikan pengetahuan yang berguna bagi masyarakat dan pembaca mengenai bidang hukum perdata khususnya dalam penyelesaian gugatan sederhana.
3. Sebagai salah satu syarat akademik bagi penulis untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Adapun jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode penulisan Hukum Yuridis Empiris. Pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam

kenyataannya di masyarakat.⁷ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. Karena di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah berwenang untuk menyelesaikan perkara mengenai gugatan sederhana, dan penulis menemukan data mengenai dismissal yang dikeluarkan karena tidak sesuai dengan perma yang berlaku. Dan penulis menemukan fakta mengenai perbedaan pengertian mengenai arti “kepentingan yang sama” yang menjadi salah satu syarat untuk dikatakan sebagai gugatan sederhana.

3. Sumber Data

1) Data Primer : Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.⁸ Dalam hal ini penulis melakukan teknik pengambilan data dengan wawancara terhadap responden, yaitu hakim-hakim di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

2) Data Sekunder : Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer.

Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang

⁷ Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakara, Sinar Grafika, 2002), hlm 15

⁸ Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2006) hlm 30

diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.⁹ Diantaranya yang penulis jadikan sumber data sekunder ialah :

- 1) Peraturan Mahkamah Agung Nomer 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
- 2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- 3) Reglement op de Burgelijke Rechtvordering.
- 4) Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura.
- 5) Het Herziene Indonesisch Reglement.
- 6) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- 7) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
- 8) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 9) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- 10) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1986 tentang Peradilan Agama.

⁹ Marzuki, Metodologi Riset (Yogyakarta: PT. Hanindita Dffset, 1983) hlm 56

4. Teknik Pengumpulan Data

1) Penelitian Pustaka

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan landasan teoritis dan bahan hukum dengan mempelajari karya ilmiah, buku-buku tentang hukum, artikel-artikel hukum, dan perundang-undangan.

2) Penelitian Lapangan

Penulis melakukan penelitian langsung di lokasi penelitian, yaitu di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. Yaitu dengan melakukan wawancara terhadap hakim-hakim yang menangani secara langsung perkara gugatan sederhana. Dalam hal ini penulis menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur, yaitu penulis tidak menggunakan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan spesifik, namun hanya memuat poin-poin penting dari masalah yang digali dari responden.

5. Analisis Data

Data sekunder maupun data primer yang dikumpulkan dan diperoleh dianalisis secara kualitatif selanjutnya akan dibahas secara deskriptif dengan menguraikan setiap permasalahan serta penyelesaian yang berkaitan dengan penelitian.

F. Sistematikan Penulisan.

Pada penulisan ini, penulis akan menyajikan 4 (empat) bab yang didalamnya terdiri dari beberapa sub bab. Sistematika yang penulis sajikan sebagai berikut:

1) BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat poin yang menjadi latar belakang bagi penulis untuk memilih judul tersebut serta berisi mengenai permasalahan yang akan diteliti oleh penulis. Juga sebagai pengantar dalam memahami penelitian ini.

2) BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membuat landasan teori-teori yang mendukung penulisan penelitian ini. Pada bab ini landasan teori didapat dari literatur buku-buku, jurnal, artikel, perundang-undangan, dan sumber hukum lainnya.

3) BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini memuat uraian tentang jawaban atas permasalahan yang tertulis dalam rumusan masalah yang berhubungan dengan objek yang diteliti serta menguraikan metode penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, serta analisis data.

4) BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan penulis.